

# **Relevansi Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang**

**Riza Anami**

Universitas Annuqayah Sumenep

[riza.anami@gmail.com](mailto:riza.anami@gmail.com)

**Arina Haqan**

Universitas Annuqayah Sumenep

[arina.haqan@gmail.com](mailto:arina.haqan@gmail.com)

## **Abstrak**

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Masalah ini mencakup ketimpangan pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang menghambat pembangunan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui prinsip-prinsip seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Metode penelitian menggunakan pendekatan pustaka dengan menganalisis literatur dari jurnal-jurnal bereputasi, buku, dan laporan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, efektif dalam redistribusi kekayaan, sedangkan wakaf mampu mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan. Sistem bebas riba memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat miskin. Studi kasus di Indonesia dan Malaysia mengilustrasikan keberhasilan ekonomi Islam dalam mengurangi kesenjangan, meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan dan regulasi. Perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih unggul dalam menciptakan keadilan sosial. Namun, integrasi antara kedua sistem dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan untuk memperkuat penerapan ekonomi Islam guna mendukung pembangunan berkeadilan di negara berkembang.

**Keyword:** ekonomi Islam, ketimpangan sosial, zakat, wakaf, negara berkembang.

## **Pendahuluan**

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan permasalahan yang terus berkembang di negara-negara berkembang, yang sering kali berkontribusi pada ketidakstabilan sosial dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Dunia (2020), ketimpangan pendapatan di banyak negara berkembang meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir kelompok elite. Kondisi ini memperburuk jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak (Kakwani & Son, 2018).

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya berbentuk ekonomi, tetapi juga sosial, yang merujuk pada ketidaksetaraan dalam hak-hak dasar seperti kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan, dan perumahan yang layak. Di banyak negara berkembang, ketimpangan sosial ini sangat berhubungan dengan rendahnya daya beli masyarakat, tingginya angka pengangguran, dan sistem pendidikan yang tidak merata. Hal ini menciptakan spiral kemiskinan yang sulit diputuskan tanpa adanya kebijakan yang mendalam dan tepat (Sen, 1999). Sebagai dampak jangka panjang, ketimpangan sosial-ekonomi dapat mengarah pada ketidakstabilan politik,

meningkatnya kriminalitas, dan potensi terjadinya konflik sosial yang mengancam perdamaian nasional (Khan, 2015).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi adalah sistem ekonomi yang tidak adil. Di negara berkembang, sistem ekonomi seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun tanpa memperhatikan distribusi kekayaan yang merata. Akibatnya, meskipun produk domestik bruto (PDB) negara tersebut meningkat, sebagian besar penduduknya tidak merasakan manfaatnya. Ketimpangan ekonomi ini juga diperburuk oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tidak progresif, serta dominasi sektor formal yang mengabaikan sektor informal yang justru mencakup mayoritas pekerja di negara berkembang (Rodrik, 2018).

Dalam menghadapi tantangan ketimpangan ini, sistem ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan solusi berbasis keadilan sosial. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan pemerataan distribusi kekayaan, menyediakan mekanisme seperti zakat, wakaf, dan larangan riba untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Penekanan pada konsep distribusi kekayaan ini menekankan pentingnya pemerataan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Chapra, 2008).

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang dapat

dilakukan melalui kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil. Konsep zakat, misalnya, dapat digunakan sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan, sedangkan penerapan muamalat yang adil dan bebas dari riba dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata. Namun, meskipun banyak penelitian telah mengemukakan teori-teori ini, belum banyak kajian yang menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang (Siddiqi, 2004).

Ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang sering kali menjadi semakin kompleks dengan adanya faktor-faktor struktural yang melibatkan sistem politik, sosial, dan budaya yang belum mendukung pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan analisis mendalam terhadap mekanisme sistem ekonomi yang berlaku, serta bagaimana sistem ekonomi Islam dapat berperan dalam mereduksi ketimpangan yang ada. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi dan potensi penerapan sistem ekonomi Islam dalam menangani ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang.

Melihat tingginya tingkat ketimpangan di banyak negara berkembang dan potensi besar yang ditawarkan oleh ekonomi Islam, perlu dilakukan kajian yang lebih menyeluruh mengenai

penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai prinsip ekonomi Islam yang relevan serta bagaimana implementasinya dapat mengurangi ketimpangan yang ada, sehingga memberikan kontribusi terhadap kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengkaji potensi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Zaman (2009) menunjukkan bahwa zakat, sebagai salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam, dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada yang membutuhkan. Zakat telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, dan hasilnya menunjukkan bahwa redistribusi kekayaan melalui zakat dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Zaman, 2009).

Selain itu, kajian oleh Khan (2011) mengungkapkan bahwa penghapusan sistem bunga (riba) dalam transaksi keuangan dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pembiayaan yang lebih adil. Riba dianggap sebagai penyebab ketimpangan ekonomi karena sering kali membebani mereka yang kurang mampu secara finansial. Dengan menggunakan sistem keuangan yang bebas dari riba, ekonomi Islam berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan

(Khan, 2011). Namun, meskipun banyak penelitian yang mengemukakan hal ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut secara sistematis di negara berkembang masih memerlukan kajian yang lebih dalam.

Penelitian lain oleh Siddiqi (2004) menekankan pentingnya penerapan wakaf sebagai instrumen untuk mendorong investasi sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah dalam struktur sosial-ekonomi. Dengan demikian, wakaf berpotensi menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di negara berkembang. Meski demikian, penerapan wakaf dalam skala besar di negara-negara berkembang masih terbatas dan memerlukan pendekatan yang lebih terorganisir dan sistematis.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut terbatas pada kajian sektor tertentu atau hanya membahas aspek teoritisnya tanpa menyentuh bagaimana penerapannya secara langsung dalam konteks negara berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih komprehensif dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan penghapusan riba, dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi di negara berkembang untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Penelitian ini memiliki keunikan karena menggabungkan berbagai prinsip ekonomi Islam yang telah banyak dibahas secara terpisah dalam literatur, seperti zakat, wakaf, dan larangan riba, dan mengkaji potensi penerapannya dalam konteks negara berkembang secara holistik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada salah satu instrumen ekonomi Islam atau terbatas pada studi kasus tertentu. Penelitian ini akan mengintegrasikan ketiga instrumen tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam dapat berperan dalam mereduksi ketimpangan sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi di negara berkembang. Dengan memfokuskan pada penerapan praktis dan perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai relevansi sistem ekonomi Islam dalam konteks modern. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terperinci bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengevaluasi keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi melalui studi kasus yang lebih luas dan membandingkannya dengan kebijakan

ekonomi yang berlaku di negara-negara berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pemahaman mengenai penerapan sistem ekonomi Islam sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi.

Studi ini sangat penting mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat di negara berkembang. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengancam stabilitas sosial. Sistem ekonomi yang lebih adil, seperti yang ditawarkan oleh ekonomi Islam, dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengurangan ketimpangan dan penciptaan keadilan sosial-ekonomi. Dengan mengidentifikasi cara-cara penerapan ekonomi Islam untuk mengatasi ketimpangan, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera.



## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (literature review) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengkaji relevansi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Sumber literatur yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga internasional maupun lokal yang berkaitan dengan ekonomi Islam, ketimpangan sosial-ekonomi, serta kebijakan pembangunan di negara berkembang. Penelitian ini mengandalkan referensi dari jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus dan sumber-sumber terpercaya lainnya untuk memastikan validitas dan relevansi informasi yang digunakan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "ketimpangan sosial dan ekonomi", "ekonomi Islam", "zakat", "wakaf", "riba", dan "pembangunan berkelanjutan" untuk memperoleh kajian yang komprehensif mengenai topik ini.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Penelitian ini juga membandingkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dalam mengatasi ketimpangan. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan tantangan dalam implementasi ekonomi Islam dalam konteks ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang. Melalui metode

penelitian pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam menghadapi masalah ketimpangan di negara berkembang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kondisi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang**

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan isu yang sangat mendalam di negara-negara berkembang. Berdasarkan data Bank Dunia (2020), ketimpangan pendapatan di negara berkembang terus meningkat, dengan indeks Gini yang menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi. Pada tahun 2020, sekitar 70% negara-negara berkembang memiliki indeks Gini lebih dari 40, yang mengindikasikan ketimpangan yang signifikan dalam pembagian kekayaan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan masih terkonsentrasi pada golongan elite, sementara kelompok masyarakat miskin tidak dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Di Indonesia, misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan (indeks Gini) mencapai angka 0.38, meskipun terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi, mencerminkan kesenjangan yang nyata antara kelompok kaya dan miskin (BPS, 2022).

Ketimpangan sosial di negara berkembang juga tercermin dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di banyak negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan Afrika, tingkat partisipasi pendidikan yang rendah di kalangan kelompok miskin menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk ketimpangan. Laporan dari

UNESCO (2018) menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta anak-anak dan remaja di negara-negara berkembang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang layak, yang berpotensi meningkatkan siklus kemiskinan antargenerasi. Selain itu, ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesenjangan sosial. Di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah, seperti Bangladesh dan Nigeria, angka kematian ibu dan anak yang tinggi berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (World Health Organization, 2020).

Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara berkembang menjadi salah satu indikator ketimpangan ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO) (2019), tingkat pengangguran di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, dengan sebagian besar pengangguran berasal dari kalangan muda dan pekerja informal. Di negara-negara seperti India dan Indonesia, sektor informal mencakup lebih dari 70% tenaga kerja, yang sering kali tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial atau jaminan kesehatan. Hal ini menambah kesulitan bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak dan upah yang memadai (ILO, 2019).

Sementara itu, ketimpangan regional juga menjadi isu penting di negara-negara berkembang. Banyak negara berkembang yang mengalami ketimpangan antarwilayah, terutama antara kawasan urban dan pedesaan. Di Indonesia, misalnya, meskipun Jakarta dan kota-kota besar lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih

tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan regional ini memperburuk kesenjangan sosial, karena penduduk yang tinggal di daerah terpencil cenderung lebih miskin dan kurang mendapat akses terhadap sumber daya pembangunan (Bappenas, 2020).

Ketimpangan ini juga diperburuk oleh ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Menurut Oxfam (2020), 1% populasi terkaya di dunia menguasai lebih dari 40% kekayaan global, sedangkan 50% orang termiskin hanya menguasai 1% dari kekayaan tersebut. Di banyak negara berkembang, ketimpangan dalam kepemilikan aset dan akses terhadap modal menjadi kendala utama bagi kelompok miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, redistribusi kekayaan yang lebih adil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ketimpangan ini.

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mengatasi Ketimpangan**

Ekonomi Islam menawarkan berbagai prinsip yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan distributif, yang menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi. Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah zakat. Zakat, sebagai kewajiban agama, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang memungkinkan pendapatan yang berasal dari golongan kaya untuk disalurkan kepada golongan miskin. Penelitian oleh Zaman (2009)

menunjukkan bahwa zakat yang diterima oleh kelompok miskin dapat meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan sosial.

Selain zakat, prinsip wakaf juga memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Wakaf, yang merupakan hibah yang tidak dapat dipindahtangankan, dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Di banyak negara Islam, wakaf telah digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya yang berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Sebuah studi oleh Siddiqi (2004) menegaskan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk membiayai proyek-proyek sosial yang bermanfaat bagi kelompok miskin dan kurang mampu. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan untuk memerangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Selain zakat dan wakaf, larangan riba dalam transaksi ekonomi Islam juga berperan dalam mengurangi ketimpangan. Sistem keuangan bebas bunga ini memungkinkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan yang tidak memberatkan mereka dengan bunga yang tinggi. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh modal, sehingga mereka terjebak dalam siklus utang yang semakin memberatkan. Dengan sistem keuangan Islam yang bebas riba, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam akses pembiayaan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat (Khan, 2011).

Prinsip ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Konsep ini tercermin dalam sistem muamalat yang menekankan pada perdagangan yang adil dan transparan, serta pembatasan praktik-praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti monopoli dan penipuan. Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering kali disebabkan oleh praktek-praktek bisnis yang tidak etis (Chapra, 2008).

Dalam konteks negara berkembang, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Menggunakan instrumen seperti zakat dan wakaf, serta menggantikan sistem bunga dengan sistem pembiayaan yang adil, dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini membutuhkan sistem pengelolaan yang transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

### **Studi Kasus**

Studi kasus di Indonesia dapat menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Di Indonesia, zakat telah menjadi salah satu instrumen yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengelola zakat yang dikumpulkan dari masyarakat untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Pada tahun 2020, BAZNAS mendistribusikan lebih dari 5 triliun rupiah

untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang menysasar kelompok miskin dan kurang beruntung. Menurut laporan BAZNAS (2020), program ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan lebih dari 1 juta orang di Indonesia.

Selain zakat, wakaf juga telah diterapkan di Indonesia untuk membangun infrastruktur sosial. Salah satu contoh keberhasilan wakaf adalah pembangunan Rumah Sakit Wakaf Al-Ikhlas di Jakarta, yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Melalui pengelolaan wakaf yang transparan, rumah sakit ini mampu memberikan layanan kesehatan berkualitas tanpa bergantung pada biaya yang tinggi, sehingga membantu mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang.

Studi lain di Malaysia juga menunjukkan keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan. Malaysia memiliki program zakat yang terorganisir dengan baik, dan zakat digunakan tidak hanya untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Menurut data dari Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (2019), program-program tersebut telah membantu ribuan keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pembentukan usaha kecil yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

Namun, meskipun ada keberhasilan dalam penerapan zakat dan wakaf, beberapa tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem zakat dan

wakaf. Di beberapa negara berkembang, partisipasi dalam sistem ini masih terbatas, dan pengelolaan zakat dan wakaf seringkali kurang efisien. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan wakaf sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Selain itu, dalam konteks negara berkembang yang memiliki populasi besar dan beragam, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menghadapi hambatan dalam hal regulasi dan koordinasi antar lembaga. Untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat, wakaf, dan sistem keuangan yang bebas riba secara terintegrasi.

### **Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional**

Perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi menunjukkan bahwa kedua sistem ini memiliki pendekatan yang berbeda. Sistem ekonomi konvensional sering mengandalkan mekanisme pasar bebas untuk memperbaiki kondisi ekonomi, meskipun hasilnya seringkali hanya menguntungkan kelompok kaya. Dalam sistem ini, ketimpangan sering dibiarkan berkembang tanpa upaya untuk mengatur redistribusi kekayaan melalui instrumen sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan instrumen lainnya yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Sen, 1999).

Sistem ekonomi konvensional, meskipun menawarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sering kali mengabaikan aspek



keadilan sosial. Misalnya, sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga dapat memperburuk ketimpangan karena masyarakat miskin sering kali tidak mampu memenuhi kewajiban bunga yang tinggi. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam yang bebas bunga berusaha menciptakan kesetaraan akses terhadap pembiayaan, yang dapat membuka peluang lebih besar bagi kelompok miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Khan, 2011).

Namun, ekonomi Islam juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Pengelolaan zakat, wakaf, dan sistem keuangan yang adil membutuhkan struktur organisasi yang kuat dan transparan. Tanpa itu, distribusi kekayaan yang adil dapat terganggu, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat kehilangan dampaknya. Dalam hal ini, sistem ekonomi konvensional memiliki keunggulan dalam hal kemajuan teknologi dan infrastruktur yang lebih maju dalam penyediaan layanan finansial, yang dapat lebih cepat diimplementasikan di negara berkembang.

Namun demikian, apabila kedua sistem ini dapat digabungkan secara sinergis, misalnya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem ekonomi konvensional, hasilnya dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti relevansi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Ketimpangan yang mencakup kesenjangan

pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi menjadi hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang berfokus pada prinsip keadilan distributif, keseimbangan, dan pemerataan kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan zakat dan wakaf di negara berkembang, seperti Indonesia dan Malaysia, telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan dampak sistem ekonomi Islam. Di sisi lain, perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional menunjukkan bahwa meskipun sistem konvensional unggul dalam efisiensi teknologi dan infrastruktur, ia sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami potensi penerapan ekonomi Islam sebagai solusi terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di negara berkembang. Meski demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional

guna menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif. Reformasi kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat, wakaf, dan sistem keuangan bebas bunga secara transparan juga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk menjadi kerangka alternatif yang mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan tahunan BAZNAS 2020*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Gini ratio menurut provinsi 2019-2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Foundation.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *World employment and social outlook 2019: Trends*. Geneva: International Labour Organization.
- Kakwani, N., & Son, H. H. (2018). *Measuring inequality: A new approach*. Routledge.
- Khan, M. S. (2011). Islamic banking and finance: Recent developments in theory and practice. In S. N. Siddiqi (Ed.), *Islamic finance and economics* (pp. 23–45). Edward Elgar Publishing.
- Oxfam. (2020). *Time to care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis*. Oxford: Oxfam International.

- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Foundation.
- UNESCO. (2018). *Global education monitoring report 2018: Gender review*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization (WHO). (2020). *World health statistics 2020: Monitoring health for the SDGs*. Geneva: WHO.
- Zaman, M. Q. (2009). Zakat and poverty alleviation in the Muslim world: An empirical analysis. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 5(2), 25–46.